

PEMETAAN POTENSI EKONOMI SEKTORAL PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

¹Andi Samsir, ²Abdul Rahman

¹Universitas Negeri Makassar, ²Universitas Islam Negeri Alauddin
syamsir_fe03unm@yahoo.co.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan mengetahui tingkat potensi sektor ekonomi yang dapat menunjang pengembangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif ekonomi makro regional yang berbasis angka-angka, yang sifatnya penelitian yaitu verifikatif-kuantitatif, yaitu menggunakan formula-formula ekonomi regional terhadap data makro regional Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak ditekankan pada penelitian data sekunder, berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan dan data Produk Domestik Bruto (PDRB) Indonesia untuk periode tahun 2010-2015. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen dan analisis Overlay.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kegiatan dan kegiatan sosial merupakan sektor yang unggul di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa lainnya merupakan sektor yang potensial yang masih dapat berkembang dengan pesat atau sektor yang sedang booming. Sedangkan sektor jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat potensi yang dapat menunjang pengembangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Tipologi Klassen, Overlay, Booming

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan harapan otonomi daerah, maka suatu daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kewenangan ini mencakup perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah dan pemanfaatan secara optimal potensi wilayah, akan tetapi pelimpahan wewenang ini berisikan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu daerah menjadi penanggung jawab utama dalam maju mundurnya suatu daerah. Hal ini berarti daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang tepat untuk memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, agar pertumbuhan bisa berkesinambungan, ini berarti pemerintah daerah harus jeli dalam menetapkan visi, misi strategi dan prioritas dalam perencanaan pembangunan wilayah maupun secara sektoral (Taringan, 2005).

Dalam rangka membangun daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada secara bersama-sama dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005). Menurut Siregar (2004), sumberdaya-sumber daya yang di miliki setiap daerah dibedakan menjadi tiga aspek pokok, yaitu: 1) sumberdaya alam adalah sumber kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, 2) Sumberdaya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, keterampilan dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya, dan 3) Infrastruktur adalah buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk

kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan maksimal, baik untuk saat ini maupun keberlanjutan di masa yang akan datang. Sehingga penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh.

Dengan demikian, Pembangunan daerah harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah. Selain itu, juga harus diperhatikan adanya keseimbangan pembangunan antar daerah. Adanya kenyataan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi baik sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun kondisi geografis yang berbeda-beda menyebabkan daerah memiliki potensi untuk berkembang. Adanya perbedaan potensi daerah tersebut menyebabkan ada daerah berkembang secara cepat, begitu pula sebaliknya ada daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Adanya perbedaan potensi antar daerah ini menyebabkan peran pemerintah pusat sebagai pengatur kebijaksanaan pembangunan nasional tetap di perlukan agar timbul keselarasan, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu daerah, baik yang memiliki potensi yang berlebihan maupun yang kurang memiliki potensi (Tjiptoherijanto, 1995).

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, Sulawesi Selatan telah menetapkan dua arahan kebijaksanaan pokok pembangunan ekonomi yaitu; pertama, pengembangan sektor industri dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing yang diarahkan dari pola

produksi padat karya dan sumberdaya alam menjadi padat keterampilan dengan nilai tambah yang tinggi. Kedua, pengembangan sektor pertanian diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

Sejalan dengan beberapa pokok pikiran di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah, serta keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya yang relatif belum memadai, maka timbul suatu pemikiran untuk menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan publik. Keadaan ini dapat dilakukan, antara lain dengan mengetahui dan mengidentifikasi pertumbuhan, dan basis ekonomi unggulan dari sektor-sektor (17 sektor)

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data penelitian, lebih banyak ditekankan pada penelitian data sekunder yang berupa data-data, dokumen, laporan dan informasi yang telah ada sebelumnya baik berupa data umum dan data khusus.

Data umum digunakan untuk memberikan gambaran tentang wilayah penelitian, yang meliputi keadaan geografis dan administratif, kebijakan pembangunan daerah dan kondisi perekonomian wilayah.

Sedangkan data khusus dimaksudkan untuk menganalisis masalah penelitian yaitu:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2015
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional (Indonesia) menurut kesembilan sektor ekonomi tahun 2010-2015
- 3) Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan tahun 2010, digunakan untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Data-data lainnya yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data sekunder dilakukan melalui metode dokumentasi yaitu melalui dokumen berupa laporan, catatan dan informasi yang berkaitan dengan materi bahasan penelitian ini. Institusi yang menjadi sumber pengumpulan data adalah Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tipologi Klassen

Untuk mengetahui posisi sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi digunakan analisis Tipologi Klassen pendekatan sektor. Analisis Tipologi Klassen pada dasarnya membagi dua indikator utama, yaitu pertumbuhan sektor ekonomi dan kontribusi. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan sektor sebagai sumbu vertikal dan rata-rata kontribusi

sebagai sumbu horizontal, maka sektor ekonomi yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: sektor cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), sektor maju tetapi tertekan (*high income but low growth*), sektor berkembang cepat (*high growth but low income*), dan sektor relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafri, 1997).

Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral, sebagai berikut :

Kuadran I Sektor maju dan tumbuh dengan pesat $g_i > g, s_i > s$	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan $g_i < g, s_i > s$
Kuadran III Sektor potensial/masih dapat berkembang dengan pesat $g_i > g, s_i < s$	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal $g_i < g, s_i < s$

Di mana,

g_i = Tingkat pertumbuhan sektor Provinsi Sulawesi Selatan

g = Tingkat pertumbuhan sektor Indonesia

s_i = Tingkat kontribusi sektor Provinsi Sulawesi Selatan

s = Tingkat kontribusi sektor Indonesia

2. Identifikasi Sektor/subsektor Ekonomi Potensial

Dalam mengidentifikasi sektor/subsektor ekonomi potensial di Provinsi Sulawesi Selatan, akan dilakukan *Overlay* antara Analisis MRP dan analisis LQ.

a. Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Analisis MRP dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial terutama struktur ekonomi wilayah Provinsi yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik secara eksternal (Nasional) maupun internal (wilayah studi). Pendekatan analisis MRP di bagi dua yaitu: (1) rasio pertumbuhan wilayah referensi (RP_R), dan (2) rasio pertumbuhan wilayah sendiri (RP_S). Dari analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial pada tingkat wilayah Provinsi, yang terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu:

1. **Klasifikasi 1**, yaitu nilai RP_R (+) dan RP_S (+) berarti sektor tersebut pada tingkat nasional mempunyai pertumbuhan menonjol dan demikian pula pada tingkat provinsi.
2. **Klasifikasi 2**, yaitu nilai RP_R (+) dan RP_S (-) berarti sektor tersebut pada tingkat nasional mempunyai pertumbuhan menonjol, namun pada tingkat provinsi belum menonjol.

3. **Klasifikasi 3**, yaitu nilai RP_R (-) dan RP_S (+) berarti sektor ekonomi tersebut pada tingkat nasional pertumbuhannya tidak menonjol, akan tetapi pada tingkat wilayah provinsi pertumbuhan kegiatan tersebut menonjol. Dari sudut pandang wilayah provinsi, sektor ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan nasional atau propinsi. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan potensial yang dapat dikembangkan di wilayah nasional dan propinsi.
4. **Klasifikasi 4**, yaitu RP_R (-) dan RP_S (-) berarti sektor tersebut baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Model Rasio Pertumbuhan (Yusuf, 1999; Setyorini, 2005)

1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Refrensi (RPR)

$$RPR = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR}(t)}{\Delta ER / ER(t)} \quad (1)$$

Di mana:

RP_R = Rasio Pertumbuhan Propinsi Sulawesi Selatan
 ΔE_{iR} = Perubahan PDRB sektor i Nasional (Indonesia)
 $E_{iR}(t)$ = PDRB di sektor i pada awal periode penelitian
 ΔER = Perubahan PDRB Nasional (Indonesia)
 $ER(t)$ = PDRB Nasional (Indonesia) pada awal penelitian

2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi

$$RPS = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij}(t)}{\Delta E_{iR} / E_{iR}(t)} \quad (2)$$

Di mana:

RP_S = Rasio Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan
 ΔE_{ij} = Perubahan PDRB sektor i di Provinsi Sulawesi Selatan
 $E_{ij}(t)$ = PDRB sektor i pada awal periode penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan
 ΔE_{iR} = Perubahan PDRB sektor i Indonesia
 $E_{iR}(t)$ = PDRB awal periode penelitian Indonesia

b. Location Quotient

Metode ini digunakan untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sektor di suatu daerah (Provinsi) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala Nasional. Fungsi utama dari LQ adalah untuk mengukur kontribusi suatu sektor yang selanjutnya dapat dinyatakan sebagai tingkat keunggulan relatif suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama di daerah lain dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan nasional sebagai indikator pertumbuhan.

Formula matematis, yakni

$$LQ = \frac{V_1^R / V^R}{V_1 / V} \quad (3)$$

Di mana:

V_1^R = Total PDRB suatu sektor Provinsi Sulawesi Selatan
 V_1 = Total PDRB suatu sektor Indonesia
 V^R = Total PDRB seluruh sektor Provinsi Sulawesi Selatan
 V = Total PDRB seluruh sektor Indonesia

Kesimpulan dari analisis formula di atas, menghasilkan tiga kesimpulan berikut;

- Apabila $LQ > 1$, maka disebut sektor yang memiliki keunggulan relatif atau memiliki kontribusi nilai tambah (memiliki sektor basis)
- Apabila $LQ < 1$, maka disebut sektor yang tidak memiliki keunggulan relatif atau tidak memiliki kontribusi nilai tambah
- Apabila $LQ = 1$ berarti kegiatan sektor yang memiliki keunggulan relatif rata-rata atau kontribusi nilai tambah rata-rata

c. Analisis Overlay

Untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dapat digunakan alat yang disebut dengan analisis Overlay. Dasar analisis deskripsi overlay antara LQ dengan MRP, terdapat 4 kemungkinan yang diketahui.

1. MRP (+) dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang sangat dominan baik rasio pertumbuhan maupun keunggulan relatif (memiliki sektor basis)
2. MRP (+) dan LQ (-) menunjukkan suatu sektor yang rasio pertumbuhannya dominan tetapi tidak memiliki keunggulan relatif
3. MRP (-) dan LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang rasio pertumbuhannya kecil tetapi memiliki keunggulan relatif
4. MRP (-) dan LQ (-) menunjukkan suatu sektor yang tidak potensial baik dari kriteria rasio pertumbuhan maupun kriteria keunggulan relatif

Analisis Overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan variabel sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang berpotensi. Dalam analisis Overlay ini terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil yang diperoleh.

1. RPS positif (+) dan LQ positif (+) menunjukkan sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat dominan baik dari segi rasio pertumbuhan maupun dari segi keunggulan relatif.
2. RPS positif (+) dan LQ positif (-) menunjukkan sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang rasio pertumbuhannya dominan tetapi tidak memiliki keunggulan relatif. Kegiatan ini dapat ditingkatkan untuk dipacu menjadi sektor unggul (dominan).
3. RPS negatif (-) dan LQ positif (+) menunjukkan sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang rasio pertumbuhannya kecil tetapi memiliki keunggulan relatif. Sektor ini kemungkinan merupakan sektor yang sedang mengalami penurunan.

RPS negatif (-) dan LQ negatif (-) menunjukkan sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak potensial, baik dari kriteria rasio pertumbuhan maupun dari kriteria keunggulan relatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tipologi Klassen

Berdasarkan deskripsi indikator tersebut diatas, maka lebih lanjut dianalisis dengan Tipologi Klassen, yaitu dengan melihat pemetaan posisi sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil analisis lampiran, laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral baik di Indonesia dan provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diketahui posisi masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2011 – 2015, yaitu dapat dilihat melalui empat kuadran klasifikasi sebagai berikut:

1. Kuadran I (Sektor yang Maju dan Tumbuh Pesat)

Secara sektoral, dari ketujuh belas sektor; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur Ulang; sektor konstruksi/bangunan; sektor perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pengangkutan, sektor penyediaan Akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor Jasa keuangan dan Asuransi; sektor Real estat; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; jasa kegiatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Dilihat dari pemetaan posisi, sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam posisi kuadran I diantaranya, 1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) sektor konstruksi; 3) sektor Informasi dan komunikasi; 4) sektor Real estat; 5) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 6) dan jasa kegiatan dan kegiatan sosial. Artinya semua sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan dan; atau kontribusi yang tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan dilihat secara subsektoral hanya ada 8 (delapan) subsektor yang berada pada posisi subsektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu subsektor tanaman pangan; sub sektor tanaman hortikultura; sub sektor perikanan; sub sektor pertambangan biji logam; sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya; sub sektor industri makanan dan minuman; sub sektor jasa perantara keuangan; sub sektor jasa keuangan lainnya; sub sektor jasa penunjang keuangan; logam dasar besi & baja dan subsektor barang lainnya (pengolahan lainnya). Hal ini berarti kedua subsektor tersebut memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi yang besar dibandingkan dengan sektor yang sama di Indonesia.

Sub sektor pertanian, peternakan dan Jasa Pertanian; subsektor tanaman pangan; sub sektor perikanan; sub sektor pertambangan biji logam; sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya; sub sektor industri makanan dan minuman; sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya; sub sektor jasa perantara keuangan; dan sub sektor jasa keuangan lainnya. Provinsi Sulawesi selatan memiliki rata-rata laju pertumbuhan masing-masing 4,22 persen; 4,56 persen; 11,21 persen; 6,01 persen; 11,62 persen; 9,14 persen; 7,96 persen; 8,76 persen; dan 11,17 persen. Dengan tingkat kontribusi secara berturut-turut 15,18 persen; 7,78; 6,61 persen; 3,56 persen; 1,79 persen; 6,52 persen; 3,03 persen; 2,38 persen; dan 0,93 persen.

Sedangkan Indonesia pada sektor yang sama, laju pertumbuhan 3,90 persen dengan kontribusi 10,68 persen untuk sub sektor pertanian, peternakan dan Jasa Pertanian.

Secara berturut-turut di ikuti 2,60 persen dan 3,35 persen untuk subsektor tanaman pangan; sub sektor perikanan 7,31 persen dan 2,23 persen; sub sektor pertambangan biji logam 0,02 persen dan 1,21 persen; sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya 7,35 dan 1,70 persen; sub sektor industri makanan dan minuman 7,86 persen dan 5,89; sub sektor sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya 4,84 persen dan 2,70 persen; sub sektor jasa perantara keuangan 8,17 persen dan 2,36 persen; dan sub sektor jasa keuangan lainnya 7,45 dan 0,52 persen.

Kesembilan subsektor tersebut merupakan bagian dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor jasa Keuangan dan asuransi, Dimana, hal ini berarti bahwa subsektor tersebut adalah sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat atau sebagai subsektor yang unggul, karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa pasar yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan, dalam hal ini Indonesia.

2. Kuadran II (Sektor Maju Tapi Tertekan)

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa pendidikan pada posisi sektor yang maju tapi tertekan, dengan laju pertumbuhan yang rendah dan kontribusi yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Periode tahun 2011 – 2015 Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata memiliki laju pertumbuhan 2,88 persen dan kontribusi 0,13 persen dan sektor jasa pendidikan, rata-rata memiliki laju pertumbuhan 6,78 persen dan kontribusi 1,86 persen sedangkan Indonesia sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pertumbuhan 4,93 persen dan kontribusi 0,08 persen. serta 7,16 persen dan kontribusi 3,13 persen untuk sektor jasa pendidikan.

Di samping itu, kegiatan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan di dukung empat subsektor yang memiliki laju pertumbuhan yang rendah dan kontribusi yang lebih besar dibandingkan Indonesia atau subsektor yang maju tapi tertekan, yaitu subsektor perkebunan; sub sektor jasa pertanian dan perburuan; dan sub sektor angkutan udara.

Secara berturut-turut subsektor tersebut memiliki laju pertumbuhan 3,78 persen untuk subsektor tanaman perkebunan, subsektor jasa pertanian dan perburuan sebesar 3,57 persen, dan subsektor angkutan udara sebesar 6,02 persen, sedangkan dilihat dari kontribusi, secara berturut-turut 4,53 persen; 0,40 persen; dan 1,41 persen. Dibandingkan dengan Indonesia, dimana memiliki laju pertumbuhan 5,64 persen untuk subsektor tanaman perkebunan, subsektor jasa pertanian dan perburuan sebesar 4,70 persen dengan kontribusi 4 persen, dan subsektor angkutan udara dengan laju pertumbuhan sebesar 6,84 persen dengan kontribusi 0,63 persen.

Hal ini berarti bahwa Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa pendidikan, subsektor perkebunan; sub sektor jasa pertanian dan perburuan; dan sub sektor angkutan udara adalah sektor maju tapi tertekan atau disebut juga sektor yang telah jenuh, karena masing-masing memiliki pertumbuhan yang rendah

tetapi memiliki kontribusi yang besar dibandingkan dengan daerah yang menjadi acuan, dalam hal ini Indonesia.

3. Kuadran III (Sektor yang Potensial atau Masih Dapat Berkembang dengan Pesat)

Sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa lainnya merupakan sektor yang berada pada posisi sektor yang potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, yaitu memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan Indonesia dan memiliki kontribusi yang kecil dibandingkan Indonesia. Periode tahun 2011 – 2015, rata-rata laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian 7,49 persen, sektor industri pengolahan 8,38 persen, sektor pengadaan listrik dan gas 8,01 persen, sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor 8,54 persen, sektor transportasi dan pergudangan 7,10 persen, sektor akomodasi dan makan minum 7,91 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 9,48 persen, dan sektor jasa lainnya 7,95 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan Indonesia, sektor pertambangan dan penggalian 0,29 persen, sektor industri pengolahan 4,71 persen, sektor pengadaan listrik dan gas 5,52 persen, sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor 4,46 persen, sektor transportasi dan pergudangan 7,03 persen, sektor akomodasi dan makan minum 5,89 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 7,88 persen, dan sektor jasa lainnya 7,29 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian sebesar 17,78 persen, sektor pertambangan dan penggalian 5,34 persen, dan sektor jasa-jasa sebesar 7,20 persen lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia.

Di samping kedelapan sektor tersebut, demikian pula diikuti beberapa subsektor yang lain dan berada pada posisi kategori subsektor yang potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, diantaranya; sub sektor hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor pertambangan, minyak, gas dan panas bumi, sub sektor industri pengolahan tembakau, sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi, Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, sub sektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, sub sektor barang galian dan logam, sub sektor ketenagalistrikan, sub sektor pengadaan gas, produksi es, sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, sub sektor angkutan darat, sub sektor angkutan laut, sub sektor angkutan sungai, penyediaan makan minum, sub sektor asuransi dan dana pensiun, sub sektor jasa penunjang keuangan. Hal ini berarti sektor dan subsektor tersebut dapat pula dikatakan sebagai sektor yang sedang *booming*, meskipun kontribusi/pangsa pasarnya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata daerah acuan dalam hal ini Indonesia.

4. Kuadran IV (Sektor Relatif Tertinggal)

Hanya sektor jasa perusahaan, berada pada posisi sektor yang relatif tertinggal, dimana memiliki rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi yang kecil dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi Indonesia. Selain itu, ada beberapa subsektor yang berada pada posisi sektor relatif tertinggal meskipun sektor induknya berada pada posisi sektor yang maju dan

berkembang pesat, sektor yang maju tapi tertekan dan sektor yang potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, diantaranya sub sektor kehutanan dan penebangan kayu, sub sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, sub sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional, sub sektor industri karet, barang dari karet dan plastik, sub sektor industri logam dasar, sub sektor industri barang logam, komputer barang elektronik dan peralatan listrik, sub sektor alat angkutan, sub sektor industri furniture, sub sektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan, dan sub sektor penyediaan akomodasi.

B. Analisis Potensi Sektor Ekonomi

Dari hasil analisis *Overlay* dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan dari variabel ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam analisis *Overlay* ini, dikombinasikan RPs dan LQ rata – rata selama periode penelitian yaitu 2010 – 2015. (lampiran 11).

Adapun hasil analisis *Overlay* yang mengdeskripsikan sektor maupun subsektor ekonomi yang potensial di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam analisis ini terdapat masing-masing 4 (empat) kemungkinan hasil yang diperoleh, yaitu:

- 1) Sektor
 - a. Sektor dimana RPs positif (+) dan LQ positif (+), yang menunjukkan suatu kegiatan ekonomi yang dominan baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi kemampuan kontribusi nilai tambahnya, sektor informasi dan komunikasi; dan sektor jasa kegiatan dan kegiatan sosial, sehingga sektor ini merupakan sektor yang unggul (dominan).
 - b. Sektor dimana RPs positif (+) dan LQ negatif (-), yang menunjukan suatu kegiatan ekonomi yang dominan pertumbuhannya tetapi rendah dalam kontribusi nilai tambahnya meliputi: industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; real estat; dan jasa lainnya. Sehingga sektor kegiatan ini masih dapat ditingkatkan menjadi sektor unggul (dominan).
 - c. Sektor dimana RPs negatif (-) dan LQ positif (+), dimana sektor yang rendah pertumbuhannya tetapi tinggi dalam kontribusi nilai tambahnya dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor yang sedang mengalami penurunan, meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa pendidikan.
 - d. Sektor RPs negatif (-) dan LQ negatif (-) yang menunjukan suatu kegiatan ekonomi yang rendah baik pertumbuhannya maupun kemampuan kontribusi nilai tambahnya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; transportasi dan pergudangan; dan jasa perusahaan. Sektor ini menunjukkan sektor yang tidak potensial di kabupaten Pangkajene Kepulauan.

2) Subsektor

- a. Subsektor RPs positif (+) dan LQ positif (+), yang menunjukkan suatu kegiatan ekonomi yang dominan baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi kemampuan kontribusi nilai tambahnya meliputi: perikanan; industri barang galian bukan logam; dan jasa keuangan lainnya.
- b. Subsektor RPs positif (+) dan LQ positif (-), yang menunjukkan suatu kegiatan ekonomi yang dominan pertumbuhannya tetapi rendah dalam kontribusi nilai tambahnya meliputi: pertambangan dan penggalian lainnya; industri makanan dan minuman; industri pengolahan tembakau; pengadaan gas, produksi es; perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya; perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; angkutan darat; penyediaan makan minum; jasa perantara keuangan; asuransi dan dana pensiun; jasa penunjang keuangan.
- c. Subsektor RPs positif (-) dan LQ positif (+), yang menunjukkan suatu kegiatan ekonomi yang rendah pertumbuhannya tetapi tinggi dalam kontribusi nilai tambahnya meliputi: pertanian, peternakan dan jasa pertanian; tanaman pangan; jasa pertanian dan perburuan; pertambangan biji logam; dan angkutan udara.
- d. Subsektor RPs positif (-) dan LQ positif (-), yang menunjukkan suatu kegiatan ekonomi yang rendah baik pertumbuhannya maupun kontribusi nilai tambahnya meliputi: tanaman hortikultura; peternakan; kehutanan dan penebangan kayu; sektor pertambangan, minyak gas dan panas bumi; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu; industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri logam dasar; industri barang logam; komputer barang elektronik; optik dan peralatan listrik; industri alat angkutan; industri furniture; industri pengolahan lainnya; ketenagalistrikan; angkutan laut; angkutan sungai; pergudangan dan jasa penunjang angkutan; dan penyediaan akomodasi.

Berdasarkan klasifikasi sektoral di atas, strategi pertumbuhan sektoral untuk empat jenis kuadran di atas dapat dikemukakan (walaupun secara garis besarnya), yaitu sebagai berikut: kuadran 1 ($LQ > 1$ dan $MRP > 1$), mempertahankan posisi tersebut sehingga tetap memberikan sinergi terhadap sektor ekonomi lainnya; untuk kuadran 2 ($LQ > 1$ tetapi $MRP < 1$), strategi yang dapat dilakukan adalah minimal mempertahankan posisinya karena pertumbuhan sektor ekonomi tersebut menurun, tapi sesungguhnya sektor ekonomi ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan sinergi terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lain; untuk kuadran 3 ($LQ < 1$ tetapi $MRP > 1$), strategi yang dapat dilakukan memacu peningkatan usaha pemberdayaan sektor ekonomi tersebut untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB sehingga

lambat laun dapat mencapai kuadran 1; untuk kuadran 4 ($LQ < 1$ dan $MRP < 1$), sektor tetap harus tetap eksis karena diperlukan dalam masyarakat, strategi pengembangan tetap dilakukan karena disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Dari uraian di atas, sejalan apa yang dikemukakan oleh North dalam Sjafrizal (2008) bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah di tentukan oleh keuntungan kompetitif (*competitive Advantage*) yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah dapat ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan daerah harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah. Selain itu, juga harus diperhatikan adanya keseimbangan pembangunan antar daerah. Adanya kenyataan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi baik sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun kondisi geografis yang berbeda-beda menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keterbatasan yang di milikinya. Adanya perbedaan potensi untuk berkembang secara cepat dan sebaliknya, ada daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Dengan demikian, diperlukan Identifikasi sektor-sektor ekonomi suatu wilayah/daerah dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah Sulawesi Selatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yang mana sebelumnya permasalahan ini belum dapat teridentifikasi secara lebih jelas dan terpadu.

Lebih Lanjut, Arsyad (1999), berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumber-sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

Dengan demikian, Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi pembangunan (Tjokroaminoto 1995). Berdasarkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, maka adanya sektor potensial di suatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Arsyad (1999) mengatakan bahwa sampai dengan akhir dekade 1980-an, di Indonesia terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan

keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut adalah: 1) Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Pemikiran seperti ini boleh dikatakan diwakili oleh kalangan ekonom-akademis. 2) Konsep Delapan Wahana Transformasi Teknologi dan Industri yang di kemukakan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Habibie), yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara serentak (simultan) dan 3) Konsep keterkaitan antar industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir. Konsep ini merupakan konsep menteri perindustrian (Tungki Ariwibowo).

Dari analisis dan pembahasan dapat tergambar secara jelas sektor unggul dan sektor potensial di provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sektor potensial yang ada sangat memungkinkan bahwa sektor tersebut sedang mengalami penurunan dan perlu ditingkatkan apakah pertumbuhannya ataukah kontribusinya sehingga menjadi sektor yang menonjol. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (1999), Suharsih (2001) dan Setyorini (2005).

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemetaan posisi sektor dengan Tipologi Klassen, maka sektor ekonomi yang meliputi ;
 - a. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor konstruksi; sektor Informasi dan komunikasi; sektor Real estat; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa kegiatan dan kegiatan sosial berada pada posisi sektor yang cepat maju dan cepat tumbuh (sektor unggul), Disamping ditopang secara subsektoral 8 (delapan) subsektor yang berada pada posisi subsektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sub sektor tanaman pangan; sub sektor tanaman hortikultura; sub sektor perikanan; sub sektor pertambangan biji logam; sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya; sub sektor industri makanan dan minuman; sub sektor jasa perantara keuangan; sub sektor jasa keuangan lainnya; sub sektor jasa penunjang keuangan; logam dasar besi & baja dan subsektor barang lainnya (pengolahan lainnya).
 - b. Sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa lainnya. Artinya semua sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan dan; atau kontribusi yang tinggi dibandingkan dengan Indonesia dan merupakan sektor yang potensial yang masih dapat berkembang dengan pesat atau sektor yang sedang *booming*. Diikuti beberapa Sub sektor hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor pertambangan, minyak, gas dan panas bumi, sub sektor industri pengolahan tembakau, sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi, Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, sub sektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, sub sektor barang galian dan logam, sub

sektor ketenagalistrikan, sub sektor pengadaan gas, produksi es, sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, sub sektor angkutan darat, sub sektor angkutan laut, sub sektor angkutan sungai, penyediaan makan minum, sub sektor asuransi dan dana pensiun, sub sektor jasa penunjang keuangan.

- c. Di posisi sektor yang maju tapi tertekan (jenuh) terdapat Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa pendidikan, hal tersebut didukung oleh yaitu subsektor perkebunan; sub sektor jasa pertanian dan perburuan; dan sub sektor angkutan udara.
 - d. Hanya sektor jasa perusahaan berdasarkan pemetaan posisi tipologi klassen berada pada sektor relatif tertinggal. Namun ada beberapa subsektor yang berada pada posisi sektor relatif tertinggal meskipun sektor induknya berada pada posisi sektor yang maju dan berkembang pesat, sektor yang maju tapi tertekan dan sektor yang potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat, diantaranya sub sektor sub sektor kehutanan dan penebangan kayu, sub sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, sub sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional, sub sektor industri karet, barang dari karet dan plastik, sub sektor industri logam dasar, sub sektor industri barang logam, komputer barang elektronik dan peralatan listrik, sub sektor alat angkutan, sub sektor industri furniture, sub sektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan, dan sub sektor penyediaan akomodasi.
2. Berdasarkan hasil analisis *overlay* antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui tingkat potensi sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Dimana sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kegiatan dan kegiatan sosial dimana sektor kegiatan ini masih dapat berkembang dan dapat ditingkatkan menjadi sektor unggul (dominan). Sektor-sektor tersebut juga ditopang oleh masing-masing subsektor yang masih dapat berkembang dan ditingkatkan, yaitu subsektor perikanan; subsektor angkutan udara dan subsektor jasa keuangan lainnya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan, maka penulis mengajukan beberapa saran terhadap kebijakan pengembangan perekonomian sektoral di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor yang relatif tertinggal, agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan sektor tersebut ke depannya.
2. Kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya diprioritaskan pada sektor dan subsektor unggulan atau sektor atau subsektor yang potensial yang masih dapat berkembang dan ditingkatkan.

-
3. Pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah sehingga dalam pengelolaannya dapat memberikan sumbangsih nilai tambah bagi masyarakat serta para pelaku usaha.
 - b. Membangun infrastruktur fisik, sarana dan prasarana yang dapat menunjang pengembangan masing-masing sektor ekonomi.
 - c. Kebijakan investasi, diantaranya mengundang datangnya para investor, pengadaan kredit lunak dengan pengelolaan secara professional.
 - d. Mengadakan koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha (masyarakat) di masing-masing sektor-sektor ekonomi, dalam upaya mengatasi ketimpangan antar sektor ekonomi.

PUSTAKA

- [1] R. Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Seruni com, 2007, Makassar.
- [2] L. Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi kedua BPFE, 2005, Yogyakarta.
- [3] M. Baiquni, *Sesat Pikir Perencanaan Pembangunan Regional: Refleksi Kritis di Era Otonomi*. Forum Perencanaan Pembangunan, 2005.
- [4] M. Kuncoro, *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri-Industri*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- [5] Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. 2006. *Pendapatan Regional*. Online. (<http://www.sulsel.go.id/pendapatan-regional.html>). Diakses 20 Mei 2008.
- [6] P. Iskandar, *Economics, Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007
- [7] H.M. Safi'I, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Perpektif Teoritik*. Averroes Press, Malang, 2007.
- [8] S.G. Diah, Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten-Kabupaten Anggota Lembaga BARLINGMASCAGEB. *Tesis Sekolah Pasca Sarjana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.
- [9] T. Robinson. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Edisis Revisi. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.